

KRONOLOGIS KONTRAK KARYA DI INDONESIA DAN USAHA PERTAMBANGAN PT. FREEPORT INDONESIA (PT. FI)

¹Ukar W. Soelistijo

¹Jurusan Teknik Pertambangan – Fakultas Teknik – Unisba

e-mail: ukarws@yahoo.com; ukar@tekmira.esdm.go.id

Abstrak. *PTFI sebagai perusahaan KK Generasi I dengan pertambangan tembaga nomor 3 terbesar di dunia dan pertambangan emas nomor 1 terbesar di dunia, telah berhasil sebagai penyumbang penting baik dalam ekonomi Indonesia (PDB, PDRB, pencipta kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat, pembangunan daerah) maupun sosial budaya masyarakat setempat; dan sebagai pionir pengembangan masyarakat sekitar. Namun partisipasi PT FI tersebut masih perlu ditingkatkan kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia pada masa 30 – 40 tahun mendatang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran PT FI terhadap ekonomi Indonesia dengan metode ekonomi makro.*

Kata kunci: PT FI, peran ekonomi.

1. Pendahuluan

Pada tahun akhir dasawarsa 1960-an Indonesia menghadapi beberapa permasalahan politik-keamanan, ekonomi dan hubungan dengan negara tetangga. Dalam masalah ekonomi dihadapi antara lain hutang negara, kemiskinan/kelaparan, inflasi, rendahnya investasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, timbul pemikiran mengundang investasi asing atau penanaman modal asing (PMA), dan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA sejalan dengan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan juncto UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Masuklah PT FI sebagai PMA pertama bidang pertambangan mineral (umum) pada tahun 1968 dan menandatangani KK dengan Pemerintah Indonesia, sebagai Generasi KK I. Sampai sekarang telah ada 8 generasi KK di Indonesia. Skema sejarah perusahaan PT Freeport Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1. Perusahaan induk PT FI adalah Freeport-McMoran Copper and Gold Incorporated (FCS), yang sebelumnya Freeport Minerals Company, dan awalnya adalah Freeport Sulphur Company yang berkedudukan di Amerika Serikat. Freeport Sulphur Coy merupakan podusen belerang terbesar dunia, kemudian berubah nama menjadi Freeport Minerals Coy karena mengembangkan usahanya di bidang mineral yang lain selain belerang. Perkembangan perusahaan mengharuskan konglomerasi dengan perusahaan lain untuk meningkatkan dananya, dan menjadi Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. untuk mengembangkan antara lain pertambangan tembaga di Papua sekarang ini (Sabirin, 2010). PT Freeport Indonesia dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal



Gambar 1. Skema Sejarah Perusahaan PT Freeport Indonesia

Generasi KK 1967 – Sekarang (8 Generasi)

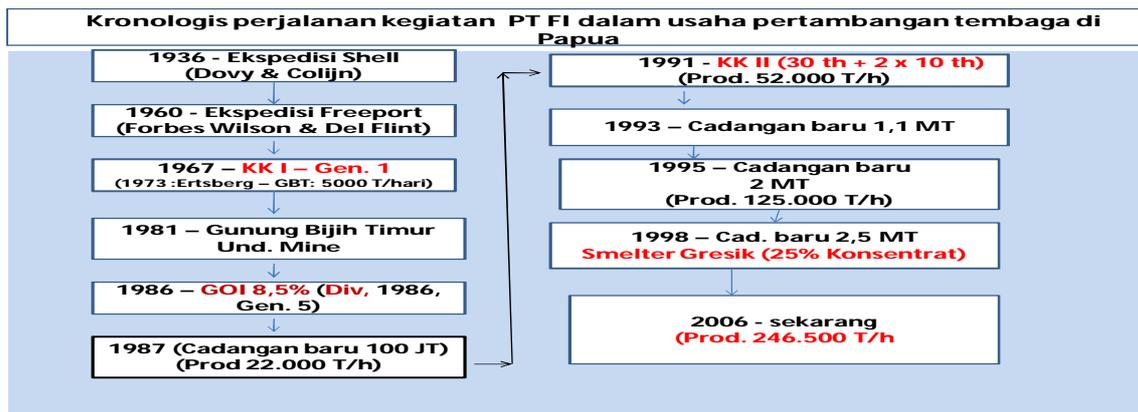
- | |
|---|
| 1. KK Generasi I (1967 - 1968): Tax holiday 3 tahun (1 KK:PT Freeport Indonesia) |
| 2. 2KK Generasi II (1968 - 1976): Divestasi maksimum 45% (16 KK) |
| 3. KK Generasi III (1976 - 1985): Divestasi 5 – 51%, boleh joint venture (13 KK) |
| 4. KK Generasi IV (1985- 1986): Perpajakan progresif (95 KK) |
| 5. KK Generasi V (1986 – 1996): Divestasi mengacu PP No. 20/1994; pembangunan smelter, frontier development (7 KK) |
| 6. KK Generasi VI (1996 - 1997): Depresiasi dipercepat PP No. 34/1994 (65 KK) |
| 7. KK generasi VII (1998): sama dengan generasi VI (38 KK) |
| 8. KK Generasi VIII (1998 – sekarang): Baru ada indikasi masuk PMA 1 buah (Pasir besi DIY) |

Gambar 2. Kronologis Kontrak Karya (KK) dari Tahun 1967 Sampai Dengan Sekarang

Asing Pasal 3 Ayat 1, bahwa dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) harus dibentuk badan usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.

Perkembangan Kontrak Karya (KK) sejak tahun 1967 sampai sekarang dapat dibagi dalam tahapan 8 generasi. Generasi I 1967-1968 dengan masuknya PT Freeport Indonesia dengan fasilitasi adanya *Tax Holiday* selama tiga tahun. Generasi II tahun 1968-1976 dengan adanya keharusan divestasi. Generasi III tahun 1976-1985 disamping divestasi perusahaan diizinkan mengadakan *joint venture*. Generasi IV tahun 1985-1986 diberlakukannya perpajakan progresif. Generasi V tahun 1986-1996 perusahaan KK diharuskan mengadakan *smelting* di dalam negeri di samping mengembangkan program pengembang wilayah dalam upaya meningkatkan nilai tambah bagi kepentingan nasional. Generasi VI tahun 1996-1997 perusahaan diizinkan melakukan depresiasi dipercepat. Generasi VII tahun 1997-1998 pada dasarnya sama dengan kondisi Generasi VI. Generasi VIII tahun 1998 sampai sekarang baru ada indikasi masuknya sebuah perusahaan KK yaitu pertambangan pasir besi di pantai selatan DI Yogyakarta.

Khususnya perkembangan PT Freeport Indonesia bermula dengan ditemukannya dari ekspedisi Forbes Wilson dan Del Flint dari Freeport Minerals Coy sebagai kelanjutan ditemukannya endapan bijih tembaga di Ertsberg (Gunung Bijih) di daerah pegunungan Puncak Jaya Wijaya tahun 1960 sebagai kelanjutan penemuan dari ahli geologi Shell (Dovy dan Colijn) pada tahun 1936. Endapan bijih tembaga berupa bukit setinggi 179 meter, pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, berjumlah cadangan sekitar 30 juta ton menarik Freeport Minerals Coy untuk mengusahakannya sejalan dengan kehendak Pemerintah Indonesia. Pada tahun 1967 ditandatangani KK Generasi I antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia selama 30 tahun, dan mulai produksi tahun 1973



Gambar 3. Kronologis perjalanan kegiatan PT FI dalam usaha pertambangan tembaga di Papua

dengan teknik tambang terbuka (*open pit mining*). Tahun 1981 PT FI mulai memperluas kegiatan penambangan dengan tambang dalam di daerah tersebut sejalan dengan ditemukannya cadangan baru. Pada tahun 1986 Pemerintah Indonesia memperoleh divestasi sebesar 8,5 % dari PT FI, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam divestasi sejak tahun 1968. Perkembangan selanjutnya diadakan perpanjangan KK sebagai KK II pada tahun 1991 selama 30 tahun ditambah 2 kali 10 tahun sampai tahun 2041, karena ditemukan cadangan baru yang sangat besar di daerah Grasberg pada ketinggian 4000m dari permukaan laut. Produksi semula 5000 ton bijih per hari pada awal KK meningkat menjadi 52.000 ton per hari tahun 1991 dan sekarang menjadi sekitar 240.000 - 250.000 ton per hari. Sementara itu pada tahun 1998 perusahaan mendirikan smelter tembaga di Gresik sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam peningkatan produksinya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memperoleh nilai tambah bagi kepentingan nasional (Sabirin, 2010; Mahler, 2008; Machribie, 2006; Clark, 2008).

1.2 Permasalahan

Pada awalnya yaitu tahun 1967 Pemerintah belum ada pengalaman dalam menangani investasi asing bidang pertambangan. Pada tahap ini diperlukan pembinaan terhadap BUMN bidang pertambangan. Di sisi lain, untuk mempercepat masuknya PMA diperlukan fasilitasi antara lain *tax holiday*, depresiasi dipercepat, keringanan pajak dan sebagainya. Dalam pada itu kepentingan nasional perlu dicakup di dalam perjanjian KK antara lain penerimaan negara, penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja nasional, divestasi nasional, pengembangan wilayah.

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengutarakan upaya nasional dalam menjawab pemecahan masalah ekonomi yang dihadapi negara melalui sector pertambangan umum, antara lain: meningkatkan penerimaan negara, penciptaan *job* dan *income* bagi masyarakat.

1.4 Manfaat

Dengan kekayaan Indonesia dalam sumberdaya alam khususnya mineral, diharapkan investasi baik asing dan domestik dapat memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan di daerah dalam upaya capaian kecerdasan, kesejahteraan dan ketenteraman rakyat Indonesia.

2. Pembahasan

2.1 Teori dan Metodologi

Investasi merupakan solusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi : $Y = f(C, I, G, X, M)$. $GNP = I + C + G + X - M + \text{income neto dari luar negeri} = \text{GDP} + \text{net income from abroad}$. Dalam hal ini I = investasi; C = konsumsi; G = pengeluaran pemerintah; X = ekspor; M = impor.

Dengan investasi akan diciptakan kesempatan kerja yang akan memberikan pendapatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai daya beli. Perlu disusun program pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta termasuk asing. Program memerlukan dana. Dana pemerintah memerlukan hutang, sedangkan investasi swasta khususnya asing (*Foreign Direct Investment*) adalah tanggung jawab perusahaan. Untuk itu diperlukan fasilitasi agar mereka mau masuk ke Indonesia, maka disusun UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan lebih khusus lagi Kontrak Karya dalam pertambangan mineral, Kontrak Bagi Hasil dalam pertambangan minyak dan pertambangan batubara.

Peranan perusahaan KK terhadap pembangunan nasional dapat diukur dengan kontribusinya terhadap ekonomi dan nonekonomi. Kontribusi dalam ekonomi diukur secara finansial dan nonfinansial. Kontribusi finansial dapat secara langsung (pajak, royalti dan semamcamnya) dan tidak langsung (upah gaji, pembangunan daerah dan semamcamnya). Kontribusi langsung dapat diukur dengan a.l. terhadap PDB dan PDRB, pengembangan wilayah, CSR termasuk pengembangan masyarakat. Peranan CSR perusahaan dapat diukur dengan indikator a.l. *Net Social Gain (NSG)*, *Social-Cost Benefit Analysis*, *Shift-Share Analysis*, *Location Quotient*.

Berbagai macam pajak dan kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan KK kepada negara adalah:

- 1). Iuran tetap (*Dead rent*): US\$ 0.025 – 3 /ha.
- 2). Iuran produksi/eksploitasi (*royalty*).
 - a). Konsentrat (Cu + Au).
Royalty tembaga sebesar 4%, emas 3,75 %, dan perak 3,25 % dari harga masing-masing komoditi logam.
 - b). Mineral lain antara 2 – 7 % dari harga logam/konsentrat/bijih tergantung jenis mineralnya.
- 3.). PPH Badan
 - a). 15%, Pendapatan Kena Pajak (PKP), sama atau lebih kecil daripada Rp. 10 juta.
 - b). 25%, PKP, lebih besar daripada Rp 10 juta – sama atau lebih kecil Rp 50 juta.
 - c). 30%, PKP, lebih besar daripada Rp 50 juta.
- 4). PPH karyawan pasal 21, 26 UU No. 7 Tahun 1983.
- 5). PPH bunga, dividen, sewa, jasa (PPH 1984).
- 6). PPN (UU No. 8 Tahun 1970).
- 7). Bea materai (UU. No. 13 Tahun 1985).
- 8). Bea Masuk (UU No. 11 Tahun 1970).
- 9). PBB:
 - a). Pra produksi = Iuran tetap.
 - b). Periode produksi = Iuran Tetap + 0.5% x 20% dari penerimaan kotor.
- 10). Pungutan/Pajak Pemda.
- 11). Administrasi umum.
- 12). PHP kendaraan bermotor.
- 13) Pemenuhan kewajiban pajak yang lain.

Salah satu model yang digunakan untuk mengukur nilai anfaat perusahaan bagi masyarakat setempat adalah *Net Social Gain (NSG)*:

$$\text{Net Social Gain (NSG)} = R - C \pm \text{NEE} \quad \dots (1)$$

$$\text{NSG} = (u_j - m_j - r_j) v_j - f s_j v_j \pm E_j \quad \dots (2)$$

$$\text{DRC (domestic resource cost)} = f s_j v_j \pm E_j / (u_j - m_j - r_j) v_j \quad \dots (3)$$

$$\text{NGC} = \text{NSG} / \text{Total Output. (Indonesia} < 10\%) \quad \dots (4)$$

Dalam hal ini: R = *revenue*; C = *cost*; u_j = nilai pendapatan ekspor sektor j ; m_j = *intermediate goods imported*; r_j = *repatriation*; v = *shadow price*; f = *commodity price*; E_j = *external effect* = *backward linkages (BL)* + *forward linkages (FL)* + *Fiscal Linkages* + *Final Demand Linkages* + *Technological Linkages*.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Khususnya peran dan manfaat PT FI terhadap pembangunan di Indonesia dapat mencakup hal-hal berikut :

- 1) Manfaat finansial 1992-2010 berjumlah sebesar AS\$ 28,7 milyar (Anonim (d), 2011) dengan rincian:
 - a. Langsung (pajak, royalty, dividen, biaya dan pembayaran lain) AS\$ 11,4 milyar;
 - b. Tidak langsung (upah dan gaji, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri) AS\$ 17,3 milyar.

Manfaat finansial sekitar AS\$ 1,5 milyar (atau sekitar Rp 13,5 triliun) per tahun merupakan masukan yang amat berarti bagi pembangunan nasional ataupun daerah. Bagi daerah manfaat finansial tersebut akan dinikmati dalam bentuk DAU dan DAK di samping sebagai dana bagi hasil kekayaan alam dalam rangka otonomi daerah, termasuk pembinaan dan pelestarian kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian terjadi transformasi proses pembangunan berbasis sumberdaya alam (*natural resource based development*) ke pembangunan berbasis pengetahuan (*knowledge based development*) selanjutnya ke tingkat pembangunan berbasis social budaya (*social cultural based development*) dalam rangka memperoleh capaian manusia madani khususnya di Papua maupun di Indonesia umumnya.

2) PDB dan PDRB.

Sebagai gambaran kontribusi sektor pertambangan umum pada PDB nasional tahun 2009 adalah sebesar 8,9 %, yang sebelum tahun 1990 kurang dari 2 %.

Peran PT FI terhadap PDB dan PDRB di Indonesia sekarang ini adalah: PDB (Nasional) 1,59 %; PDRB Provinsi Papua 68 %; PDRB Kabupaten Mimika 96 %. Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika terlihat sangat tergantung kepada PT FI. Jangka panjang ketergantungan ini perlu dikurangi tahap demi tahap melalui pengembangan sector potensial di daerah tersebut (Anonim (d), 2011).

Dengan demikian kontribusi PT FI terhadap sektor pertambangan adalah sebesar 17,9% di luar kontribusi dari perusahaan-perusahaan pertambangan umum yang lain.

3) Total investasi infrastruktur dll + sarana sosial AS\$ 5,6 milyar, pembelian barang & jasa dalam negeri AS\$ 5 milyar (Anonim (d), 2011). Infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan, jembatan dan semacamnya merupakan masukan yang amat strategis bagi pengembangan ekonomi daerah, karena menjamin mobilitas sumberdaya misalnya tenaga kerja, bahan, barang capital, informasi serta teknologi dan output produksi barang dan jasa antardaerah. Fasilitas tersebut membantu upaya konvergensi ekonomi antardaerah di negara ini.

4) Kesempatan kerja total berjumlah 22.381 orang, dengan kesempatan kerja langsung berjumlah 12.736 (2010) orang (Papua asli 28%). Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Dengan terbukanya kesempatan kerja khususnya bagi penduduk asli Papua di PT FI, akan memberikan nilai tambah tersendiri di dalam membangun manusia Papua seutuhnya dalam menghadapi masa depannya secara mandiri. Ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan di Indonesia.

5) Pengembangan SDM Papua (Program operasional dan kemitraan). Pengembangan SDM ini dimaksudkan untuk membekali insan Papua dalam profesionalitas dan kepercayaan diri mereka di dalam era globalisasi, sehingga mereka dapat bekerja di mana saja yang mereka mau. Kalau *Human Development Index (HDI)* Indonesia tahun 2001-2002 sebesar 68,3 (UNDP, 2002), maka HDI Kota Jaksel dengan *score* sebesar 75,7 (tertinggi), DIY 75,3, Kab Mimika 64,8, Kab Jaya Wijaya 47,0 (terendah) menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika berada *score* pertengahan, dimana PT FI beroperasi (Anonim (c), 2006).

6) CSR dengan Net Gain Coefficient 0,82% (1990), sekarang diperkirakan sekitar 1%. Sebagai perbandingan, NGC PT INCO sebesar 1,28% (1989), PT Antam (nikel) sebesar 4,21% (1990) dan PT BA 4,31% (1999) (PPTM, 2000).

CSR suatu perusahaan baru dikatakan berhasil apabila insan setempat di mana perusahaan beroperasi memperoleh manfaat maksimal di dalam membekali diri mereka sehingga terlihat secara nyata dalam keberlanjutan dari segi-segi kemanusiaan, social, ekonomi dan lingkungan secara seutuhnya, serta ke depan benar-benar harmonis di dalam ke empat hal tersebut.

7. Perkembangan Harga Tembaga, Emas dan Perak

Dalam dekade terakhir harga komoditi tembaga, emas dan perak naik 3-4 kali, sehingga perusahaan mendapatkan *windfall profit*.

Harga emas naik 3-4 kali : *US\$ 350 - US\$ 1.100/troyounce*, laju tahunan 33%. Harga tembaga naik 3-4 kali: *US\$ 2.000 - US\$ 7.500/mt*, laju tahunan 41%. Harga perak naik 4 kali: *US\$ 5 - US\$ 20/t.ounce*, laju tahunan 59%.

Dengan kenaikan harga internasional komoditi mineral dalam sepuluh tahunan terakhir ini, sudah jelas bahwa perusahaan pertambangan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dari keuntungan yang besar tersebut sudah pada tempatnya perusahaan pertambangan KK memberikan manfaat balik yang berlipat ganda pula kepada masyarakat di mana mereka berusaha.

8) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan produksi yang ditempuh PT FI adalah :

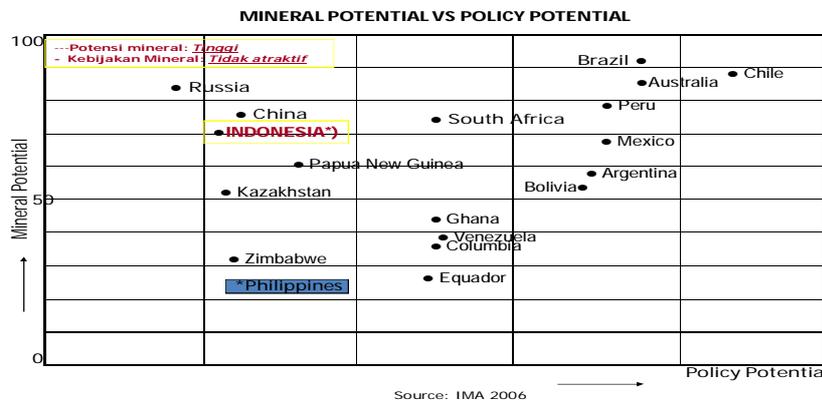
- Tarif royalty naik *on top* sesuai dengan peraturan yang ada.
- *Recovery* dalam ekstraksi (pengolahan) dinaikkan di atas 87% sesuai dengan asas konservasi melalui peningkatan efisiensi dalam teknik penambangan dan pengolahan.
- *Slope stability* dalam penimbunan *overburden* dan *tailing*, agar mengurangi atau mencegah bahaya longsor atau ambrukan.
- Pemeliharaan fungsi lingkungan hidup dari sejak reklamasi dan penumpukan *overburden*, perataan *tailing* di dataran/delta sungai Aykwa Timika, revegetasi dengan tanaman yang sesuai dengan iklim dan ketinggian lokasi, penetralan limbah tambang dan pengolahan dari pantai daerah Amamapare sampai dengan daerah Grasberg (4000 meter dpl).
- Pembangunan *smelter* konsentrat tembaga di dalam negeri yaitu Gresik, dalam rangka memperoleh capaian nilai tambah di dalam negeri. Dari produksi konsentrat sekitar

2,5 juta ton, baru sekitar 750.000 ton yang diolah di smelter Gresik, sisanya masih diekspor ke China, Korea Selatan, Jepang, Spanyol, dan Filipina. Pada waktunya diharapkan agar semua hasil konsentra PT FI di Papua dapat diolah di dalam negeri, sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal. Hal ini lebih baik lagi apabila dibangun pula industri hilir yang dapat menyerap tembaga, emas dan perak, sekaligus hasil sampingannya seperti asam sulfat yang menghasilkan komoditi guna akhir (*end use commodity*).

9) Perbaiki kebijakan.

Kondisi potensi mineral di Indonesia masih menjanjikan (Tabel 1), untuk itu diperlukan perbaikan kebijakan pertambangan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia (Gambar 4), kalau masih diinginkan PMA di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan PMA di Indonesia antara lain adalah: kepastian hukum dan kepastian berusaha, KK, aspirasi masyarakat, PETI, keamanan, tumpang tindih antara wilayah pertambangan dengan wilayah kehutanan (UU 41/1999), tata ruang, Ham dan demokratisasi, inventarisasi, pemanfaatan, konservasi, lingkungan hidup (tuntutan pemenuhan standar lingkungan hidup yang makin ketat), sub-marine tailing disposal (PP 82/2001), otonomi daerah (tuntutan daerah terhadap perimbangan penerimaan pusat dan daerah dan pungutan yang tidak diatur dalam kontrak), peta wilayah laut Otda, ketentuan fiskal pada usaha pertambangan, adanya ketentuan royalty yang baru (PP No. 45 tahun 2003 sebagai pengganti PP No. 13 tahun 2000, dimana tarif royalti untuk beberapa mineral dan batubara lebih tinggi dari tarif sebelumnya (PP 58 tahun 1998)), perubahan paradigma Community Development (CD).



Gambar 4. Posisi Indonesia dalam kondisi potensi mineral terhadap status kebijakan mineral

Tabel 1. Gambaran Potensi Mineral di Indonesia

INDONESIAN COAL AND MINERAL RESERVED (2004)

COMMODITY	UNIT	RESOURCES	RESERVES
lead (metal)	Ton	622,402	462,402
nickel (ore)	Ton	1,338,182,200	627,810,000
copper (metal)	Ton	66,206,347	41,473,267
primary Gold (metal)	Ton	5,297	3,156
silver (metal)	Ton	36,013	11,417
iron Sand (concentrate)	Ton	47,169,416	9,557,846
bauxite (metal)	Ton	207,931,993	23,999,901
manganese (metal)	Ton	866,795	105,000
coal	Ton	57,847,700,000	6,981,620,000

Source: Directorate of Inventory of Mineral Resources, 2004

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

PTFI dengan pertambangan tembaga nomor 3 terbesar di dunia, dan pertambangan emas nomor 1 terbesar di dunia, telah berhasil sebagai penyumbang penting dalam bidang ekonomi Indonesia (PDB,PDRB, pencipta kesempatan kerja dan *income* bagi masyarakat, pembangunan daerah) disamping dalam bidang sosial budaya; dan sebagai pionir/perintis pengembangan masyarakat setempat dengan embrio kemandirian dalam menghadapi masa depan mereka terutama setelah tambang PT FI ditutup karena telah habis cadangannya.

3.2 Saran

Perlu dirintis suatu *grand post mining regional planning* untuk aerowisata dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan ketenteraman hidup umat (*green mining practice*)_sebagai bagian dari *green economy* global.

4. Daftar Pustaka

- Achjar,N., (2007). *Dampak Fiskal dan Ekonomi PT Freeport Indonesia*. LPEM UI. Diskusi Pembangunan Papua dan Peran PT Freeport Indonesia, Puslitbang Tekmira, DESDM.
- Anonim (a), (2003). *Keteguhan Tekad Kami*. PT Freeport Indonesia.
- Anonim (b), (2006). *Laporan Penelitian Analisa Dampak Ekonomi PT Freeport Indonesia, Update Tahun 2006*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI.
- Anonim (c), (2006). *Berkarya Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan, 1992-2006*. PT Freeport Indonesia.
- Anonim (d), (2011). Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Papua. PT Freeport Indonesia, Seminar Nasional Pertambangan dan Pendidikan Dibi Unisba,6 Mei 2011.
- Clark, B, dkk (Tim Manajemen), 2009. *Buku Pendamping Tour 2009*. PT Freeport Indonesia, July.
- Machribie, A., (2006). *Unsur-unsur Pembangunan Berkelanjutan*. PT Freeport Indonesia.
- Mahler,A., Sabirin, N, (2008). *Dari Grasberg Sapai Amamapare*. PT Freeport Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Sabirin, N, dkk (penyunting), (2010). *Tembagapura: Tambang, Keunikan dan Keindahan Alam di sekitarnya*. ISBN 978-602-95706-1-8, PT Freeport Indonesia, Aksara Buana, Jakarta.
- Sagir, S, (2009). *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*.Prenada Media Group, Jakarta.
- Soelistijo, U.W., (2011). Pembudayaan IPTEK Dalam “Green Mining Practice” Sebagai Upaya Peningkatan Nilai Tambah Kegiatan Pertambangan di Indonesia. Seminar Nasional Pertambangan, Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung (UNISBA), Bandung, 6 Mei 2011.
- Trijono,L., (2007). Pembangunan Berkelanjutan di Papua dan Peran PT. Freeport Indonesia: Peluang Kemitraan Multi-Pihak PT. Freeport, Pemda dan Masyarakat. Diskusi Pembangunan Berkelanjutan di Papua dan Peran PT. Freeport Indonesia, Peluang Kemitraan di antara Stakeholders. Puslitbang Tekmira, Bandung.
- Wibowo, N.W.,(2010). Implikasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua Terhadap Investasi Pertambangan Minerba di Papua. Seminar Pemantauan dan Analisis Problema Terkini Bidang Pertambangan Minerba (2010), Puslitbang Tekmira, 29 Nopember 2010.
- Wilson, F, 1981. *The Conquest of Copper Mountain*. Atheneum, New York.